

BAB III

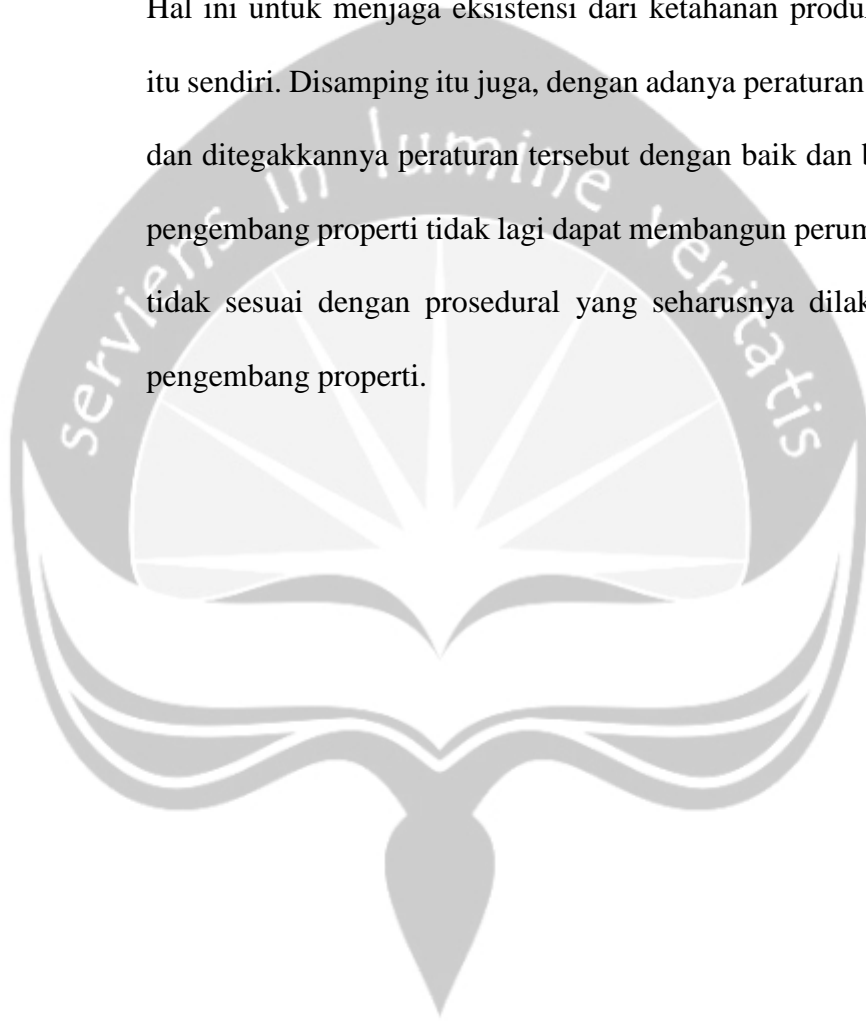
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran di Bab II, penulis menyimpulkan bahwa tiga perumahan dari tiga kecamatan yang penulis jadikan sampel penelitian para pengembang yang melakukan pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. Hal ini dapat dibuktikan dari lahan yang dialihfungsikan sudah bukan lahan pangan berkelanjutan tetapi adalah lahan yang sifatnya multikultural, dan juga Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Izin Lokasi. Hal ini dapat dibuktikan dari pengurusan awal yaitu Informasi Tata Ruang (ITR), Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP), pengurusan izin lokasi, sampai mendapatkan akta pelepasan hak atas tanah dari pemilik tanah sebelumnya yang diberikan kepada pengembang, sehingga pengembang bisa melakukan pelaksanaan pembangunan perumahan diatas lahan tersebut.

B. Saran

Peraturan-peraturan yang mengatur terkait dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan yang dilakukan oleh pengembang properti harus dipertahankan oleh pemerintah daerah. Hal ini untuk menjaga eksistensi dari ketahanan produksi pangan itu sendiri. Disamping itu juga, dengan adanya peraturan yang tegas dan ditegakkannya peraturan tersebut dengan baik dan benar, para pengembang properti tidak lagi dapat membangun perumahan yang tidak sesuai dengan prosedural yang seharusnya dilakukan para pengembang properti.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, 1996, *masalah pencabutan hak-hak atas tanah, pembebasan tanah dan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adi Sasono dalam Ali Sofyan Husein, 1995, *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Arba, 2017, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djumialdji, 1996, *Hukum Bangunan: Ctk. Pertama*, Rineka Cipta, Jakarta.
- I Wayan Suandra, 1991, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Cetakan Pertama PT Rineka Cipta, Jakarta.
- John Salindeho, 1987, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sedino M.P Tjondronegoro, 1999. *Sosiologi Agraria*, Akatiga, Bandung.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia, Jakarta
- Soejono, 1996, *Hukum Lingkungan Dalam Peranannya Dalam Pembangunan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Sumadi Suryabata, 1983. *Metode Penelitian*, Edisi Pertama, Rajawali, Jakarta.
- Supriadi, 2009, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tejoyuwono Notohadiprawiro, 2006, *Kemampuan dan Kesesuaian Lahan: Pengertian dan Penerapannya*.
- Urip Santoso, S.H., M.H., 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Prenada Media Group.

Jurnal

- I Made Mahadi Dwipradnyana, 2014. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Konversi lahan Pertanian Serta Dampak Terhadap Kesejahteraan Petani* (study kasus di subak jadi, kecamatan kediri, tabanan), Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar.

Website

<https://megapolitan.kompas.com/read/2008/05/29/14062635/Bangunan.Hijau.He mat.dan.Ramah.Lingkungan.?page=all> diakses pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 pada pukul 15:56

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149.

Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2019 Tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 777. Jakarta.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Izin Lokasi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1022. Jakarta.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail

Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1308. Jakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030. Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5. Kabupaten Pati.



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN PATI

Jl. Supriyadi No.22 Pati Telp. (0295) 381152

Kode Pos 59114

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/94/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : M. BUDI PRASETYA, S.Sos
NIP : 19690925 199001 1 002
JABATAN : CAMAT PATI

Menerangkan nama yang tersebut dibawah ini ::

NAMA : CHRISTOPHE ADRIEL PANDU BAGASKARA
NIM : 150511865
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Bahwa nama tersebut diatas telah melaksanakan wawancara untuk penelitian di Kecamatan Pati dengan Judul Skripsi : "PELAKSANAAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN MENJADI PERUMAHAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGEMBANG PROPERTI DI KABUPATEN PATI JAWA TENGAH

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya



M. BUDI PRASETYA, S.Sos.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690925 199001 1 002

SURAT KETERANGAN

Nomor : UP.02.04/1379 - 42-18/IX/2019

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati menerangkan bahwa :

Nama : Christophe Adriel Pandu
NPM : 150511865
Jurusan : Fakultas Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Judul Skripsi : Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Perumahan yang dilakukan oleh pengembang property di kabupaten Pati.

Telah melakukan wawancara di Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Pati mengenai kegiatan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan.
Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 25 September 2019

An. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN APATI
Kepala Seksi Penataan Pertanahan

